



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Studi Kasus: Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**Nanik Murwati
NPM: 0806441491**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
Kekhususan: Administrasi dan Kebijakan Publik**

JAKARTA
Juni, 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Nanik Murwati

NPM : 0806441491

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2010

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Nanik Murwati
NPM : 0806441491
Judul : Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Pembimbing Tesis

(Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. publ)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nanik Murwati
NPM : 0806441491
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ (.....)

Pengaji Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc (.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan tingkat pendidikan pascasarjana pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy Valiant Salomo M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer. Publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dalam kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga,dam pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Walikota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen serta staf sekretariat Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, atas segenap pengetahuan, arahan, bimbimgan

serta bantuan selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Indonesia.

7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Kepala Dinas Pendidikan, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para pejabat terkait di Biro Organisasi, Sekretariat Walikota Jakarta Pusat, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, dan Kecamatan Cakung, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan penjelasan, data, serta informasi yang diperlukan guna penulisan tesis ini.
9. Bapak Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan Ibu Novi Anggraini dari Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD), yang telah bersedia memberikan penjelasan, data, serta informasi yang diperlukan guna penulisan tesis ini.
10. Bapak tercinta yang tidak pernah berhenti mendo'akan anak-anaknya.
11. Suami dan anak-anakku tercinta atas segenap perhatian, dukungan, dan motivasi selama penulis menyelesaikan pendidikan.
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 16 program studi administrasi kebijakan publik, atas bantuan, dukungan serta kebersamaan selama menempuh pendidikan.
13. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, segenap saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan di kemudian hari. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanik Murwati
NPM : 0806441491
Program Studi : Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Juni 2010

Yang Menyatakan

(Nanik Murwati)

ABSTRAK

Nama : Nanik Murwati
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampungan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.

Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horizontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata kunci :

Implementasi kebijakan, organisasi proporsional, peraturan pelaksanaan, kapasitas sumber daya manusia

ABSTRACT

Name : Nanik Murwati
Study Program : Administrative Sciences
Title : Implementation of the Organizational Restructuring of Regional Policy (Case Study in the Province of DKI Jakarta)

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or *Peraturan Pemerintah*. The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.

Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal. The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.

To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy.

Keywords:

Policy implementation, organizational proportionate, regulatory implementation, human resource capacity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat dan Signifikansi Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
II.KERANGKA TEORI.....	17
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	24
2.3 Konsep Perubahan dan Restrukturisasi Organisasi.....	39
2.3.1 Konsep Perubahan Organisasi.....	39
2.3.2 Restrukturisasi Organisasi.....	57
2.4 Operasionalisasi Konsep.....	68
III. METODE PENELITIAN.....	71
3.1 Pendekatan Penelitian.....	71
3.2 Tipe Penelitian.....	71
3.3 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian.....	72
3.4 Jenis Data.....	73
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	74
IV.GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	76
4.1 Landasan Hukum Penetapan Perda.....	76
4.2 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	77
4.2.1 Sekretariat Daerah.....	78
4.2.2 Sekretariat DPRD.....	80
4.2.3 Dinas Daerah.....	81
4.2.4 Lembaga Teknis Daerah.....	83
4.2.5 Kota dan Kabupaten Administrasi.....	85

4.2.5.1 Kota Administrasi.....	85
4.2.5.2 Kabupaten Administrasi.....	87
4.2.6 Kecamatan.....	88
4.2.7 Kelurahan.....	89
4.2.8 Satuan Polisi Pamong Praja.....	90
4.3 Tata Kerja.....	92
4.4 Posisi Jabatan Struktural.....	93
V. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	94
5.1 Proses Penetapan Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.....	94
5.2 Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.....	112
5.2.1 Perubahan Yang Diinginkan Dari Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.....	113
5.2.2 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan.....	123
5.2.3 Sosialisasi Terhadap Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.....	130
5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.....	133
5.3.1 Komunikasi dan Koordinasi.....	134
5.3.2 Sumber Daya.....	137
5.3.3 Struktur Birokrasi.....	143
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	145
6.1 Kesimpulan.....	145
6.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.....	3
Tabel 1.2	Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.....	4
Tabel 1.3	Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota.....	5
Tabel 1.4	Pola Besaran Organisasi Perangkat Daerah.....	5
Tabel 1.5	Perbandingan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Setelah Restrukturisasi.....	10
Tabel 4.1	Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural.....	93
Tabel 5.1	Peta Alir Perubahan Organisasi Dinas Daerah.....	103
Tabel 5.2	Peta Alir Perubahan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.....	105
Tabel 5.3	Jumlah Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.....	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	17
Gambar 2.2	Proses Implementasi Kebijakan.....	21
Gambar 2.3	Tipologi Perubahan Organisasi.....	51
Gambar 2.4	Faktor Penting Dalam Penataan Organisasi.....	64
Gambar 2.5	Proses Penataan Organisasi Secarly.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara Dengan Setda Provinsi
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara Dengan Dinas Daerah
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara Dengan Kantor Walikota
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara dengan LSM
Lampiran 5	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup

